

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

**“Agama sebagai Solusi dan Pemersatu
antar Umat”**

WACANA

Suhaimi

**Politik Islam Indonesia dan Demokrasi
Pancasila di Era Reformasi**

M. Ikhsan Tanggok

**The Role of Chinese Communities to the
Spread of Islam in Indonesia**

Ida Rosyidah

Gandhi’s Ideas of Women in Hinduism

Abdul Hadi W.M.

**Takdir Alisyahbana dan Pemikiran
Kebudayaan**

Fariz Pari

**Metodologi Penelitian Keagamaan:
Dekonstruksi Hermeneutik I**

TULISAN LEPAS

Cucu Nurhayati

**Potret Perkotaan dalam Menghadapi
Globalisasi**

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. VIII, No. 3, 2006

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Amsal Bakhtiar
Kautsar Azhari Noer
Hamdani Anwar
Zainun Kamaluddin Fakhri

Pemimpin Redaksi

Edwin Syarif

Anggota Redaksi

Wiwi Siti Sajaroh
A. Bakir Ihsan

Sekretariat

Suzanti Ikhlas

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

- ~ Agama Sebagai Solusi dan Pemersatu Antar Umat

Articles

- 263-274 Politik Islam Indonesia dan Demokrasi Pancasila di Era Reformasi
Suhaimi
- 275-290 The Role of Chinese Communities to the Spread of Islam in Indonesia
M. Ikhsan Tanggok
- 291-302 Gandhi's Ideas of Women in Hinduism
Ida Rosyidah
- 303-330 Bagimu Dīnmu Bagiku Dīnku: Jejak-jejak Falsafah dan Sosial-Budaya Ayat al-Kāfirūn [109]: 6
Nanang Tahqiq
- 331-352 Takdir Alisyahbana dan Pemikiran Kebudayaan
Abdul Hadi W. M.
- 353-368 Metodologi Penelitian Keagamaan: Dekonstruksi Hermeneutik I
Fariz Pari

Document

- 369-382 Potret Perkotaan dalam Menghadapi Globalisasi
Cucu Nurhayati

AGAMA SEBAGAI SOLUSI DAN PEMERSATU ANTAR UMAT

Perdebatan agama sebagai solusi bagi umat manusia atau bukan masih merupakan pro dan kontra bagi sebagian orang. Ada di antara umat manusia yang menganggap bahwa agama tidak dapat memberikan solusi yang banyak bagi menyelesaikan berbagai persoalan, dan ada yang menganggap bahwa agama dapat memberikan solusi bagi banyak persoalan yang dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang lari ke agama atau kepada tokoh-tokoh agama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Sebagai contoh, banyak orang lari ke tokoh-tokoh agama untuk meminta pertolongan atas ketergantungan obat-obat terlarang yang menimpa dirinya. Contoh lain, banyak orang menggunakan lembaga-lembaga keagamaan untuk menyelesaikan berbagai konflik keagamaan. Mungkin ini yang dapat kita tangkap dari kesan yang dimunculkan dalam sebuah artikel di dalam jurnal ini.

Semua agama di dunia ini menawarkan berbagai konsep yang dapat digunakan untuk memberikan solusi bagi banyak persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Tentu saja konsep-konsep yang ditawarkan itu berlandaskan pada ajaran-ajaran suci yang berasal dari kitab suci masing-masing agama. Semua konsep tersebut mengarah pada bantuan yang diberikan agama untuk membawa manusia ke jalan yang benar. Konsep agama yang masih dianggap cukup jitu dalam memecahkan berbagai persoalan tersebut juga dijadikan landasan bagi banyak para ahli untuk memecahkan berbagai persoalan sosial di Indonesia.

Ada sebagian orang menganggap bahwa agama adalah dapat menyebabkan berbagai *social unrest* (kerusuhan sosial) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dewasa ini dan ada juga sebagian orang yang beranggapan bahwa agama bukanlah penyebab dari kerusuhan tapi agama dapat memberikan solusi bagi berbagai kerusuhan sosial yang ada. Teori ini masih tetap dipertahankan oleh banyak sarjana yang mengkaji masalah agama, terutama Suhaimi yang dalam tulisannya menyoroti persoalan agama dalam kaitannya dengan *social unrest* dewasa ini. Dalam tulisannya, Suhaimi melihat bahwa agama bukanlah penyebab dari banyak kerusuhan

sosial, tapi justru dapat dijadikan alat untuk meredam berbagai kerusuhan sosial yang ada.

Bicara masalah agama dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, rasanya kurang lengkap jika kita tidak membicarakan pelaku agama tersebut. Pelaku agama adalah para penganut agama-agama yang ada yang menyebarkan dan menjalankan ajaran agama tersebut. Di pundak para pelaku agama inilah agama tersebut dapat disebarkan ke seluruh masyarakat, dan dapat diperkenalkan kepada masyarakat tentang ajaran-ajaran perdamaian yang terkandung di dalamnya. Pelaku-pelaku agama ini, tidak hanya terbatas pada satu suku bangsa, tapi terdiri dari berbagai suku bangsa. Sebagai contoh agama Islam di Indonesia tidak hanya disebarkan oleh satu suku bangsa tapi oleh banyak suku bangsa, termasuk di dalamnya suku bangsa Cina. Banyak orang beranggapan bahwa orang Cina tidak mempunyai peran dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mungkin anggapan tersebut dapat dikatakan kurang tepat. Karena berdasarkan sejarah penyebaran Islam di Indonesia, orang Cina juga dapat memiliki peranan penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Dalam proses penyebaran tersebut, tidak satu pun konflik yang kita jumpai disebabkan tindakan para pelaku agama. Mungkin ada benarnya jika banyak orang yang beranggapan bahwa Islam disebarkan di Nusantara dilakukan secara damai, dan ada kalanya menggunakan kebudayaan setempat sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Jika dalam tulisannya Suhaimi menyoroti persoalan agama sumber konflik atau agama dapat dijadikan alat untuk mempersatukan berbagai suku agama dan berbagai kepentingan, namun M. Ikhsan Tanggok dalam tulisannya lebih melihat peran orang Cina dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Meskipun keduanya melihat agama dengan sudut pandang berbeda, namun kedua tulisan tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Islam dalam hal ini bukan saja dilihat dari konteks ajarannya, tapi juga dapat ditelusuri dari konteks sejarahnya. Melalui sejarah tersebut, orang dapat melihat ke belakang bagaimana pelaku-pelaku agama dapat meletakkan agama yang mereka yakini sebagai komunikasi atau penghubung antara satu dengan yang lain dan dapat membuat masyarakat berlaku damai.

Dalam tulisannya, M. Ikhsan Tanggok juga melihat betapa pentingnya melihat agama dari sudut pandang budaya atau kebudayaan. Sebab agama

tidak akan diterima dengan mudah oleh masyarakat tanpa diterjemahkan dalam berbagai kebudayaan suku bangsa. Oleh karena itu, agama dipahami secara berbeda sesuai dengan kebudayaan masing-masing suku bangsa. Namun secara teologis, ajaran-ajaran agama masih tetap dipertahankan keutuhannya. Ajaran-ajaran agama tidak semata-mata menyangkut masalah teologi tapi juga membahas tentang gender yang dewasa ini lebih banyak dibicarakan dalam diskusi-diskusi dan seminar di perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi.

Sehubungan dengan gender tersebut, maka Ida Rosyida dalam tulisannya menyajikan dengan panjang lebar masalah gender, terutama pemikiran Gandhi tentang gender. Tidak ubahnya dengan tokoh-tokoh filsuf Timur, Gandhi juga melihat adanya perbedaan antara lelaki dan wanita. Wanita menurut Gandhi selalu dinomor-duakan dan lelaki memainkan peranan penting dan berkuasa atas wanita. Dalam masyarakat patrilineal, lelaki selalu di nomor satukan, tidak hanya dalam lingkungan keluarga, namun juga dalam ritual-ritual keagamaan. Hal yang sama juga dijumpai dalam agama Hindu, di mana di dalam upacara keagamaan, laki-laki memegang peranan yang lebih penting. Meskipun demikian, pemikiran Gandhi tidak terlepas dari konsep-konsep ajaran Hindu yang mereka jadikan pedoman dan acuan dalam kehidupan sehari-hari.

Agama bukan saja bicara tentang teologi, gender sebagaimana dijelaskan di atas, tapi agama juga bicara tentang perbedaan. Bicara tentang gender sama artinya bicara mengenai perbedaan, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan agama-agama besar di dunia, perbedaan bukanlah “musibah” tapi “*rahmah*” atau dapat membawa keberkatan apabila kita dapat memahami arti dari perbedaan tersebut. Karena adanya perbedaan antara lelaki dan perempuan, maka populasi di dunia ini selalu bertambah atau berkembang. Dalam konsep agama Islam juga dikatakan bahwa berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini, adalah agar umat manusia yang berbeda tersebut dapat saling kenal-mengenal dan bekerja-sama satu dengan yang lainnya untuk mencapai satu tujuan yang mulia. Inilah makna dari adanya perbedaan, dan bukan perbedaan tersebut dijadikan alat untuk memusuhi satu dengan yang lainnya dan juga melahirkan kelompok-kelompok yang tujuannya untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya.

Dalam ajaran agama Islam juga, Tuhan sangat menghargai adanya perbedaan, lihat saja ada ayat dalam al-Qur'an (*lakum dinukum waliadin*) yang cenderung mengakui adanya perbedaan. Dalam al-Qur'an Tuhan mengakui adanya agama di luar agama Islam. Jika Tuhan sendiri mengakui keberadaan itu, kenapa umat manusia tidak mau mengakui keberadaan yang ada di luarnya. Inilah yang mungkin sangat disoroti oleh salah satu artikel dalam jurnal ini. Dalam jurnal ini, Nanang Tahqiq, melihat bahwa perlu mengkaji ayat al-Qur'an, terutama "*lakum dinukum waliadin*" sebagai alat untuk menghargai adanya perbedaan, terutama menghargai agama di luar agama Islam itu sendiri. Nanang melihat bahwa ayat tersebut tidak dipahami oleh sebagian umat Islam sesuai dengan misi ayat tersebut yang sangat menghargai adanya perbedaan. Ayat ini juga mendorong umat Islam untuk menciptakan toleransi sesama umat beragama, sehingga di antara agama-agama yang ada di dunia ini dapat saling menghargai dan bekerja sama. Oleh Karena itu, sangat tepat jika tema terbitan jurnal **Refleksi** kali ini adalah "Agama Sebagai Solusi dan Pemersatu Antar Umat". Tema ini bermakna agar agama dapat dijadikan sebagai penyelamat dan mempersatukan berbagai umat manusia di dunia untuk tujuan kemanusiaan dan persatuan.

Jakarta, Desember 2006

Redaksi

POLITIK ISLAM INDONESIA DAN DEMOKRASI PANCASILA DI ERA REFORMASI

Suhaimi

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
suhaimi@uinjkt.ac.id

Abstract: *Concerns about the decline of civic culture and the threat of national disintegration have arisen due to the emergence of local and religious sentiments among certain groups with ideologies based on religion in the post-reform era. The author assumes that historically, Pancasila is the result of ijtihad (independent reasoning) by some Muslims together with other groups in society, and the implementation of Islamic Sharia in some regional regulations does not contradict Pancasila democracy. The main issue in this writing is the relationship between Islam and the Pancasila ideology, as well as the implementation of Islamic law.*

Keywords: *Islamic politics, democracy, Pancasila, reform, Indonesia.*

Abstrak: Kekhawatiran akan merosotnya *civic culture* dan ancaman disintegrasi bangsa dikarenakan saat pascareformasi, sentimen lokal dan religius sekelompok orang dengan ideologi-ideologi yang berbasis agama muncul. Penulis berasumsi bahwa sejak semula Pancasila secara historis merupakan hasil ijtihad sebagian umat Islam bersama kelompok masyarakat lain dan penerapan syariah Islam dalam beberapa perda tidak bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah hubungan antara Islam dan ideologi Pancasila, serta penerapan syariat Islam.

Kata Kunci: Politik Islam, Demokrasi, Pancasila, Reformasi, Indonesia.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia saat ini selain menghadapi berbagai macam bencana alam seperti banjir dan gempa, juga tengah menghadapi bencana sosial seperti busung lapar dan ancaman wabah penyakit flu burung di mana-mana, bahkan Menurut Azyumardi Azra, tidak kalah mengkhawatirkan adalah ancaman merosotnya *civic culture* dan ancaman disintegrasi bangsa dalam wujudnya yang paling nyata berupa diterapkannya peraturan daerah (perda) yang berbau syariah di beberapa daerah di Indonesia.

Dalam acara simposium Hari Pancasila dengan tema: “Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas” di Universitas Indonesia, Juni, 2006, Azra menambahkan bahwa, kekhawatiran akan merosotnya *civic culture* dan ancaman disintegrasi bangsa dikarenakan saat pascareformasi, sentimen lokal dan religius sekelompok orang dengan ideologi-ideologi yang berbasis agama muncul.

Hal senada juga secara deskriptif dinyatakan oleh Saiful Mujani dalam artikelnya di *Media Indonesia*, Senin, 12 Juni 2006 dengan judul “Kelompok Islam Anarkis,” mempertanyakan apakah demokratis tindakan kolektif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kader serta para pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdemonstrasi secara damai menuntut pemberlakuan syariat, penggantian demokrasi dengan khilafah serta penggantian konsep kebangsaan dengan umat.

Sementara itu, dalam satu kesempatan wawancara dengan *Majalah Tempo*, 25 Juni 2006, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, kini menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), membantah bahwa PKS akan menegakkan syariat Islam? Katanya, “PKS di DPPR hanya 45 dari 550 kursi. Bagaimana mungkin kami disebut-sebut akan memaksakan kehendak?”.

Hidayat Nur Wahid kemudian balik menyatakan, “Kalau Pancasila dilaksanakan, permasalahan akan selesai. Tapi sekarang Pancasila sering cuma dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompok”. Ia kemudian mencontohkan bagaimana Pancasila dijadikan tameng, “Misalnya seseorang yang tidak suka dengan syariat lalu berlindung di balik Pancasila”.

Pada kesempatan lain, *Koran Tempo*, Jum’at, 23 Juni 2006, mengutip pernyataannya yang mengingatkan semua pihak yang tak setuju dengan peraturan daerah yang berbau syariat Islam agar menggunakan jalur konstitusi dalam upaya membatalkan aturan itu. “Ajukan uji materi. Kalau itu setingkat undang-undang, ke Mahkamah konstitusi. Kalau di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tertulis di atas, penulis merumuskan permasalahan pokok tulisan ini adalah:

- 1) Bagaimana hubungan antara Islam dan ideologi Pancasila di Indonesia?
- 2) Apakah penerapan syariat Islam dalam beberapa Perda beberapa daerah di Indonesia bertentangan dengan demokrasi Pancasila?

Penulis berasumsi bahwa sejak semula Pancasila secara historis merupakan hasil ijtihad sebagian umat Islam bersama kelompok masyarakat lain dan penerapan syariah Islam dalam beberapa perda tidak bertentangan dengan demokrasi Pancasila.

Kerangka Teori

Bahtiar Effendy menyatakan beberapa format studi politik Islam di Indonesia dalam karyanya, “Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia”, (Jakarta, Paramadina, 1998), Cetakan ke-1, Bab II, dari halaman 21 - sampai halaman 47, sebagai berikut:

Pendekatan Dekonfessionalisasi Islam

Tokoh pendekatan ini adalah C.A.O. Nieuwenhujjze yang memperkenalkan istilah ini dalam artikelnya “*The Indonesian State and ‘Deconfessionalized’ Muslim Concepts*,” tahun 1958. Ia berupaya menjawab persoalan bagaimana peran Islam dalam revolusi nasional dan pembangunan bangsa Indonesia dalam kerangka teori dekonfessionalisasi.

Nieuwenhuijze memperbandingkan kondisi sosio-kultural dan politik Belanda, khususnya kelompok-kelompok yang akomodasionis saat itu dengan kondisi sosio-kultural dan politik umat Islam Indonesia. Menurutnya, Islam adalah faktor dominan dalam revolusi nasional, hal itu terlihat dalam perannya pada proses pembangunan bangsa Indonesia yang menyerupai jenis dekonfessionalisasi yang berkembang di Belanda. Kalangan Islam rela melepaskan sikap formal dan kaku untuk memperluas penerimaan umum, semua kelompok yang berkepentingan, tanpa harus berubah keyakinannya. Keyakinan, katanya, tidak serta merta berubah dengan berubahnya terminologi yang dipakai dengan bersedia untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial keagamaan yang berbeda dalam cara yang telah di-“dekonfessionalisasi”.

Teori dekonfessionalisasi dalam kata-kata Nieuwenhuijze, merupakan penafsiran kreatif atas prinsip-prinsip Islam secara sedemikian rupa, dalam rangka memapankan kembali relevansinya dengan kehidupan di Indonesia abad ke-20. Di atas segalanya, umat Islam kini hidup dan ingin terus berkiprah di abad ke-20 dan, yang lebih penting, di zaman Indonesia kontemporer.

Contoh kasusnya antara lain umat Islam menerima Pancasila sebagai dasar hidup bernegara setelah berdebat sengit dengan kalangan Nasionalis Muslim dan Nasionalis Kristen. Nieuwenhuijze menegaskan bahwa secara historis setiap sila Pancasila itu punya kaitan dengan pemikiran Islam, “Kaitan tersebut, meski tidak harus bersifat formal, dapat ditemukan dalam prinsip keesaan Tuhan, demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan.”

Kasus kedua menurutnya adalah pembentukan Departemen Agama (DEPAG) sebagai lembaga yang sungguh-sungguh memperhatikan masalah-masalah agama. Dalam konteks negara nasional Indonesia, Depag tidak boleh dikelola secara eksklusif hanya bagi umat Islam dan menjurus kepada penerapan cita-cita Islam dalam pengertiannya yang sempit dan skriptualistik. Meskipun demikian pembentukan Depag “berhasil memberi rasa aman bagi umat Islam bahwa mereka sungguh-sungguh diperhatikan.”

Pendekatan Domestifikasi Islam

Teori ini sering diasosiasikan dengan karya-karya Harry J. Benda mengenai Islam di Indonesia. Ia memaparkan Teori Domestifikasi dalam

tulisannya “Continuity and Change in Indonesia Islam,” *Asian and African Studies: Annual of the Israel Oriental Studies*, Vol. 1, (1965), halaman 123 - 138, dengan melakukan analisis historis tentang Islam di Jawa pada abad ke-16 hingga abad ke-18, terutama perang perebutan kekuasaan antara kerajaan Islam pesisir Demak melawan kerajaan Mataram. Menurutnya itu adalah perebutan kekuasaan antara Islam dan non-Islam dalam sejarah Indonesia.

Meskipun pada akhirnya kerajaan Mataram memeluk Islam, menurut Benda, Islam kerajaan Mataram adalah Islam yang lain sifatnya, karena terdiri dari absorpsi sinkretis aspek-aspek tertentu Islam ke dalam arus utama Hindu-Jawa. Dalam perebutan kekuasaan ini, kelompok aristokrasi Jawa, yang mewakili negara Mataram yang sinkretis, menang besar, bahkan terjadi pembunuhan para ulama pendakwah di Mataram. “Cengkeraman politik Islam” di Jawa menjadi mandul, karena aliansi kelompok aristokrat Jawa dan kekuatan-kekuatan kolonial Belanda.

Benda kemudian menganalisis perkembangan politik Islam pada masa pasca-kolonial di Indonesia, menurutnya, tampak tingkat kontinuitas tertentu dalam kemandulan cengkeraman politik dengan masa pra-kolonial.

Penolakan keras kelompok cendekiawan sekuler -yang sangat kentara orientasi Jawanya terhadap gagasan negara Islam yang diusulkan golongan Islam, penumpasan gerakan Darul Islam, Masyumi dibubarkan, pemaparan ideologi Pancasila dan kembalinya dominasi politik Jawa, semuanya seakan-akan pengulangan dari masa lampau. Jika demikian dapat dikatakan Islam di Indonesia kontemporer telah didomestikasi secara terus menerus.

Pendekatan Skismatik dan Aliran

Teori ini secara tidak langsung menjawab pertanyaan: mengapa perebutan kekuasaan antara Islam dan Jawa-isme pada awalnya terjadi? Teori ini muncul dari tim peneliti Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang melaksanakan studi etnografis pada awal hingga pertengahan tahun 1950-an di sebuah desa kecil yang nama samarannya Mojokuto, Jawa Timur. Kemudian Teori ini lebih khusus telah diidentifikasi dengan tulisan Robert R. Jay dan Clifford Geertz.

Keduanya mencoba melihat Indonesia dari mikrokosmos Mojokuto dalam sebuah periode di mana konflik-konflik antar partai amat menonjol. Robert Jay menekankan corak skismatik hubungan Islam dan Jawa-

isme, yang kemudian berkembang melampaui wilayah konfrontasi keagamaan memasuki bidang politik, kebudayaan dan kehidupan sosial. Sedangkan Geertz mengembangkan skisme sosial-keagamaan ke dalam pengelompokan aliran sosio-kultural dan politik. Berdasarkan penelitian historis dan analisis serta penafsiran antropologis yang luas, Robert Jay mengawali kajiannya dengan memaparkan corak proses islamisasi di Indonesia secara umum. Menurutnya proselitisasi di wilayah yang pengaruh nilai-nilai keagamaan Hindu-Budha minimal, mempunyai kecenderungan mengonversi masyarakat Jawa menjadi muslim yang “ortodoks” (santri). Di wilayah ini proses islamisasi terjadi dalam bentuk penetrasi secara damai (*penetration pacifique*).

Sebaliknya di wilayah-wilayah yang pengaruh peradaban Hindu-Budha kuat, proses konversi agama, untuk sebagian besar, bercirikan perebutan pengikut antara kedua tradisi keagamaan atau terjadi sinkretisme/abangan (muslim yang Jawa-is/ kurang taat). Tidak terjadi konversi menyeluruh, melainkan semacam perebutan satu sama lain, maka yang terjadi adalah transformasi masyarakat keagamaan Jawa ke dalam bungkus abangan atau muslim “sinkretis”.

Kecenderungan skismatis kedua nilai yang berbeda di atas, kemudian berkembang ke bidang non-agama, seperti politik dengan terjadinya permusuhan antara negara-negara pesisir di Timur laut pulau Jawa, di bawah kerajaan Demak, dan negara sinkretisme Mataram di pedalaman Jawa. Pertempuran yang terjadi terus sejak abad ke-16, sebagian besar diakibatkan oleh sinkretisme tradisi keagamaan yang semakin melebar dan berkembang dari garis kontinum “ortodoks” (santri) dan “sinkretisme” (abangan). Konfrontasi yang pada akhirnya menciptakan kelompok-kelompok Sosio-kultural yang berbeda. Pertempuran ini dimenangkan oleh kerajaan Mataram yang sinkretis.

Berdasarkan konsep skismatis semacam itu, Jay mencoba menjelaskan perjalanan politik Islam dalam konteks sejarah politik Indonesia modern dan ia menyatakan adanya dua kelompok yang satu sama lain bertentangan baik dari sisi organisasional maupun ideologis serta terpusat di sekitar masalah “ortodoksi” versus “sinkretisme”.

Contoh kasusnya adalah perpecahan dalam Sarekat Islam (SI) antara para pemimpin ortodoks dan sinkretis pada tahun 1920-an dan 1930-an serta pada periode pasca kolonial karena perdebatan-perdebatan ideologis

dan konstitusional yang menyebabkan pengelompokan muslim nasionalis sekuler pada 1940-an dan 1950an.

Lebih jauh lagi polarisasi kekuatan antara kelompok muslim sekuler dan kelompok muslim ortodoks juga tampak antara lain dalam hasil-hasil pemilihan umum 1955. Saat itu meskipun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, empat partai politik Islam hanya memperoleh 43,54 suara. Jadi polarisasi kekuatan antara ortodoksi dan sinkretisme terus berlanjut yang menyebabkan keberlangsungan corak pengelompokan sosio-kultural dan politis masyarakat Jawa.

Konsep Geertz tentang Pendekatan Aliran

Berdasarkan pengelompokan sosio-kultural dan politis masyarakat Jawa itulah Clifford Geertz (1959) terinspirasi mengembangkan konsep aliran dalam arti sebagai “suatu partai politik yang dikelilingi oleh satuan organisasi-organisasi sosial sukarela baik yang formal maupun tidak formal berkaitan dengannya. ...[aliran] adalah pengelompokan organisasi secara nasional... yang menganut arah dan posisi ideologis yang sama.”

Lebih lanjut menurut Geertz, “suatu aliran lebih dari sekadar partai politik, jelas juga lebih dari sekadar ideologi, ia adalah suatu pola integrasi sosial yang komprehensif.” Jadi ada dua unsur utama yang inheren dalam konsep aliran. Pertama, pentingnya pembilahan religio-kultural dalam tradisi masyarakat Jawa. Kedua, cara di mana pembilahan semacam itu mentransformasikan diri secara agak mudah ke dalam pengelompokan-pengelompokan sosial-politik.

Jika Jay memandang masyarakat Jawa secara dikotomis dalam konsep santri dan abangan, Geertz membagi masyarakat Jawa yang ditarik dari mikrokosmosnya di Mojokuto, ke dalam tiga varian sosio-kultural yang terkenal: *abangan*, *santri* dan *priayi*, yakni “pandangan dunia dan etos yang sinkretis (*abangan*), yang Islam (*santri*), dan yang bercorak *kehinduan* (*priayi*).

Tentang tiga varian konsep masyarakat Islam Jawanya ini, Geertz memaparkan:

“abangan mewakili suatu penekanan kepada aspek-aspek animistis dari seluruh sinkretisme Jawa dan secara luas berkaitan dengan unsur petani di kalangan penduduk, santri mewakili suatu penekanan kepada aspek-aspek Islam dari sinkretisme di atas dan pada umumnya berkaitan dengan unsur dagang (juga unsur-unsur tertentu dalam kelompok petani): priayi

menekankan aspek-aspek Hinduistis dan berkaitan dengan unsur birokrasi...

Dalam dunia mikrokosmis Mojokuto, menurut Geertz, kelompok santri cenderung mengarahkan orientasi politik mereka ke partai-partai politik Islam, misalnya Masyumi atau Nahdlatul Ulama (NU), dua partai Islam terbesar tahun 1950-an. Sedangkan kelompok abangan dan priayi lebih suka mengekspresikan kedekatan politis mereka dengan partai “nasionalis” (Partai Nasionalis Indonesia [PNI] atau komunis – Partai Komunis Indonesia [PKI]).

Pendekatan Trikotomi

Pendekatan trikotomi berlandaskan pada rumusan pertanyaan bagaimanakah para aktivis politik Islam memberi respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapkan kepada mereka oleh kelompok elite penguasa. Berbeda dengan pendekatan skismatik dan aliran, teori trikotomi memusatkan perhatian kepada keragaman dan kompleksitas politik Islam dengan tiga pendekatan politik: fundamentalis, reformis, dan akomodasionis dalam masyarakat politik Islam.

Pendekatan trikotomi ini antara lain menonjol dalam karya-karya Allan Samson dan beberapa pengamat lain, seperti B.J. Boland dan Howard Federspiel yang melihat bahwa kekalahan partai-partai Islam disebabkan oleh perpecahan politis dan ideologis internal.

Samson menganalisis partai politik Islam “modern” Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan penerusnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dengan partai Islam tradisional NU, terutama dalam cara mereka menyikapi watak hegemonik negara Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Ia menemukan bahwa pandangan partai-partai Islam itu mengenai politik, kekuasaan dan ideologi tidak tunggal, bahkan mereka tidak punya sudut pandang yang sama mengenai tindakan dan strategi politik yang secara umum diterima untuk merealisasikan cita-cita politik Islam.

Oleh sebab itu Samson mencatat munculnya orientasi fundamentalis, reformis dan akomodasionis dalam kelompok-kelompok Islam dengan ciri-cirinya:

“Kelompok fundamentalis mendukung jenis penafsiran Islam yang kaku dan murni, menentang pemikiran sekuler, pengaruh barat dan sinkretisme kepercayaan tradisional dan menekankan keutamaan agama atas politik.

Secara teoritis, kelompok reformis juga menekankan keutamaan agama atas politik, tapi dibanding kelompok fundamentalis, mereka jauh lebih mau bekerja-sama dengan kelompok-kelompok sekuler atas landasan yang sama-sama disepakati. Mereka juga amat peduli dengan usaha menjadikan keyakinan agama relevan dengan era modern. Kelompok akomodasionis memberi penghargaan yang tinggi kepada kerangka persatuan yang diberikan Islam, tetapi mereka berpegang pada pandangan bahwa kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi harus mendapat prioritas yang utama oleh organisasi-organisasi Islam. Lebih jauh mereka menekankan keharusan untuk mengakui kepentingan-kepentingan yang bisa dibenarkan dari kelompok-kelompok sekuler dan bekerja-sama dengan mereka atas landasan yang sama-sama disepakati”.

Berdasarkan uraian di atas, sementara dapat dikatakan bahwa kelompok fundamentalis beranggapan bahwa satu-satunya kekuasaan politik yang sah adalah kekuasaan politik yang bersifat religius, kelompok reformis dan akomodasionis tidak menganut pandangan mengenai keabsahan kekuasaan politik yang sempit. Bagi mereka sejauh tidak memusuhi Islam, kekuasaan sekuler seperti itu dapat dianggap sah.

Banyak pemimpin politik NU pada saat itu dipandang “sering-kali dengan mudah bersifat akomodatif terhadap penguasa sekuler untuk memperoleh posisi-posisi politik yang tidak terlalu menentukan dan kontrol atas kontrol birokrasi di DEPAG. NU dituduh menjalankan politik oportuniste, karena hasratnya untuk ikut dalam kabinet mana saja”.

Pendekatan Islam Kultural

Tokoh teori ini adalah Donald K. Emmerson yang mempertanyakan validitas tesis bahwa “Islam yang berada di luar kekuasaan adalah Islam yang tidak lengkap,” atau bahwa “umat Islam yang tidak terus mengupayakan terwujudnya negara Islam adalah umat Islam yang tidak berbuat sesungguhnya demi Islam.” Dengan kata lain, teori ini adalah upaya untuk meninjau kembali kaitan doktrinal yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan negara.

Dalam perspektif historis, teori ini tampaknya dilandaskan pada kenyataan setelah masa kekalahan politis umat Islam pada sedikitnya lima bidang: konstitusi, fisik, pemilihan umum, birokrasi dan simbol, maka apa upaya-upaya umat Islam untuk mengerahkan kembali energi mereka dalam rangka mengembangkan sisi non-politis dari agama mereka.

Asumsi teori ini menyatakan, diarahkannya kembali energi politik umat Islam ke dalam kegiatan-kegiatan non-politis, bisa jadi merupakan skenario sadar untuk beralih ke dalam, menghindari dari perseteruan politik dengan golongan lain dan sesama rekan sendiri, dalam rangka menumbuhkan kesadaran keagamaan dan sosial kepada para pengikutnya. Diinginkan Islam di Indonesia dapat berkembang pesat secara kultural dan spiritual.

Emmerson cenderung melihat diskursus Islam di Indonesia sepanjang 1980-an sebagai diskursus Islam yang tengah menegaskan dimensi kulturalnya, akibatnya saat itu Islam kultural di Indonesia, menurutnya, benar-benar hidup dan berkembang baik. Dalam hal ini pemerintah memandang kesalehan religius penting untuk memperkokoh definisi diri Orde Baru yang anti-komunis.

Pada gilirannya, jika Islam kultural berkembang makin pesat dan makin berpengaruh, maka makin penting bagi para peneliti Indonesia untuk memperhatikan pertanyaan Emmerson: “Siapa yang sesungguhnya mengooptasi (mempengaruhi atau menguasai) siapa?”

Islam Politik dan Ideologi Pancasila

Tahun 1998 akhirnya reformasi politik di negara Indonesia terlaksana juga, setelah bangsa Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam dikebiri hak-hak politiknya (baca: restrukturisasi partai politik) oleh penguasa Orde Baru rezim pemerintahan Soeharto. Islam politik dan partai politik Islam kembali berperan serta aktif dalam demokrasi Pancasila di Indonesia Pada Orde Reformasi. Pancasila yang menjadi landasan konseptual kenegaraan Indonesia menempatkan agama dalam peran yang sangat penting, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama dan dipahami sebagai menjiwai sila-sila lainnya.

Dawam Rahardjo menyatakan hal ini berkaitan dengan masalah hubungan antara Islam dan Pancasila, bahwa sekalipun secara historis pada mulanya Pancasila itu lebih menampakkan pemikiran Barat, dalam perkembangannya kemudian ideologi negara Indonesia ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Islam, hal itu tampak pada penempatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa paling atas dan menjadi fondasi moral yang paling fundamental dari Pancasila (Anwar, 1995: 198).

Berdasarkan kritik yang dikemukakan oleh Bung Hatta terhadap golongan Islam yang bersikap kaku mendesakkan dasar negara Islam bagi

Indonesia dalam Majelis Konstituante, tahun 1950, bahwa umat Islam sendiri pada saat itu tidak siap dengan fondasi religio-kultural. Syafii Maarif menegaskan usaha-usaha mengubah Indonesia menjadi suatu negara Islam pada tahun 1950-an merupakan usaha prematur dan tidak realistis.

Meskipun demikian, Syafii Maarif menambahkan pendapatnya bahwa Pancasila sebagai filsafat negara harus bersifat terbuka, maksudnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam, Syafii mengharapkan agar Islam dijadikan sumber moral bagi pelaksanaan Pancasila, khususnya bagi umat Islam.

Terlepas dari asumsi pendekatan trikotomi yang juga menyatakan hubungan antara Islam dan politik bersifat organik dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara keduanya secara struktural diikat oleh sistem religius Islam yang formal, penulis berpendapat bahwa masalah adanya ancaman bencana sosial karena merosotnya integrasi nasional disebabkan munculnya sentimen lokal dan religius sekelompok orang dengan ideologi-ideologi yang berbasis agama, seperti yang menjadi asumsi dasar pendekatan trikotomi, harus dilihat sebagai tantangan yang dihadapkan kepada umat Islam.

Oleh karena itu penerapan Perda-Perda yang berbau Syariah Islam di beberapa daerah sudah sewajarnya mendapat tanggapan umat Islam bermacam-macam.

Dilihat dari pendekatan trikotomi, mereka yang berpendapat bahwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 45 yang kita terima sekarang adalah sebuah kesepakatan paling pas dan komitmen yang kuat terhadap keislaman dalam konteks keindonesiaan saat ini dan pada masa yang akan datang, termasuk kelompok sekuler yang memberi penghargaan yang tinggi kepada kerangka persatuan yang diberikan Islam, meskipun mereka berpandangan bahwa kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi harus mendapat prioritas utama oleh organisasi-organisasi Islam. Menurut Samson mereka termasuk kelompok akomodasionis.

Sedangkan kelompok yang menuntut pemberlakuan syariat dan penggantian konsep kebangsaan dengan umat serta penggantian konsep demokrasi dengan khilafah, mendukung jenis penafsiran Islam yang murni, menentang pemikiran sekuler, pemikiran Barat dan sinkretisme kepercayaan tradisional dan menekankan keutamaan agama atas politik, meskipun mereka menuntutnya dengan cara-cara damai, penulis masukkan dalam kelompok muslim fundamentalis.

Kelompok ketiga adalah mereka yang meskipun terbuka terhadap kelompok sekuler berdasarkan kesepakatan bersama, tapi mereka tetap mengutamakan agama atas politik termasuk dalam kelompok reformis.

Penutup

Pada periode kekuasaan Orde Reformasi, khususnya pasca setelah peristiwa 11 September di Amerika Serikat, bom Bali dan peristiwa-peristiwa kekerasan lainnya, terdapat satu pertanyaan yang gencar diajukan kepada agama: Apakah agama itu sumber masalah atau sumber solusi?

Sebagai lembaga yang memiliki hasrat politik mengumandangkan suara kepentingan politik umat Islam Indonesia, partai politik Islam menjadi salah satu lembaga yang berkewajiban memberikan jawaban bahwa agama adalah sumber penyelesaian masalah, bukan sebaliknya.

Dengan demikian tidak heran jika partai-partai politik Islam bersama komponen masyarakat lainnya berbondong-bondong menyuarakan ajaran Islam sebagai alternatif jawaban masalah-masalah sosial yang tak pernah kunjung dapat dijawab oleh pemerintah dengan aparatnya. “Agama bukanlah agama jika tak terlibat dalam politik,” kata Mahatma Gandhi. Persoalannya adalah keberpihakan: pada penguasa atau rakyat?

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, Cetakan kedua, Mei, 1997.
- Ahmad, Mumtaz (ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, Cetakan ke-3, April, 1996.
- Anwar, M. Syafii, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta, Paramadina, Cetakan ke-1, Desember, 1995.
- Azra, Azyumardi, *Dari Harvard Sampai Makkah*, Jakarta: Penerbit Republik, Cetakan ke-1, Juni, 2005.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, Cetakan ke-1, Oktober, 1998.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, Cetakan ke-2, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tatanegara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Pers, Cetakan kelima, 1993.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004